

**PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KEPERCAYAAN WAJIB
PAJAK DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA**

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan serta akan digunakan untuk pembangunan nasional. Sebesar 80 persen penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, masalah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Badung Utara.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara tahun 2020 yaitu sebanyak 95.542 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak prang pribadi yang ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan.